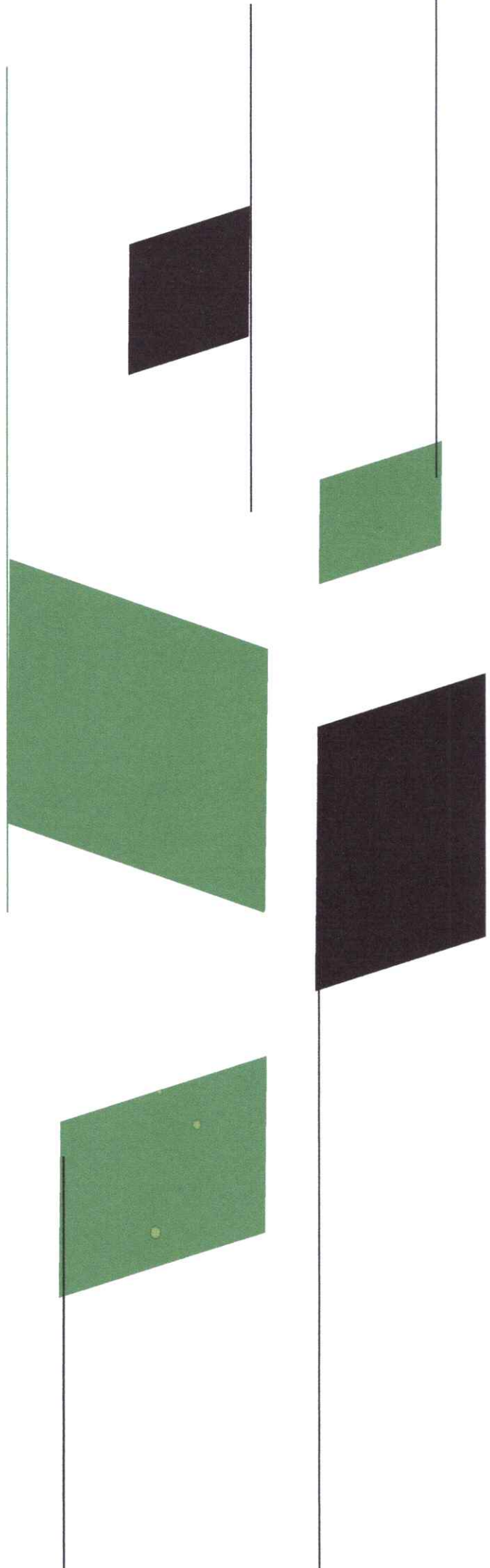




BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BONTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2023



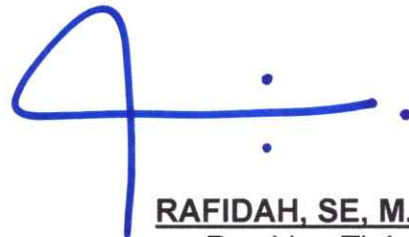
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan petunjukNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah ini akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2023. Diharapkan Rencana Kerja ini dapat dijadikan sarana dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pendapatan Daerah di Kota Bontang.

Bontang, Agustus 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah



RAFIDAH, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700323 200112 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel iii

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika dan Penulisan 4

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Bapenda Kota Bontang 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah Kota Bontang..... 15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 27

Bab III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 29

3.3 Program dan Kegiatan 30

Bab IV PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bapenda Sampai dengan Tahun 20228

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Kota Bontang14

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD21

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan27

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Bapenda Kota Bontang.....31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bontang melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Renja BAPENDA Kota Bontang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kota Bontang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Bontang Tahun 2023.

Rencana Kerja BAPENDA dijadikan dasar sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BAPENDA Kota Bontang tahun 2023 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang disusun berlandaskan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 3) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJP) Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
- 5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 7) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
 - 10) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 11) Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 13) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 Kota Bontang.
 - 14) Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2023
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
3. Merumuskan rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

1.4 Sistematika dan Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah ini secara garis besar terdiri dari 4 (empat) bab, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 2023.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bapenda Kota Bontang, menjelaskan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023); menjelaskan mengenai pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun-tahun sebelumnya; melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang dan/atau realisasi APBD.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan telaahaan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kecamatan

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Dalam rangka penyusunan renja tahun 2023, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, dan perkiraan capaian di tahun 2023, serta capaian renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2022.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bapenda

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Tahun 2021- 2026	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
			3	4	5	6	Tingkat Realisasi (%)	8	9 = (4+6+8)	10 = (9/3)				
1		2												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kerja	31	dokumen	7	dokumen	6	dokumen	100%	2	dokumen	15	dokumen	48%
Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	16	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	10	dokumen	63%
Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	60%
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	60%
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Administrasi Dokumen	15	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	9	dokumen	60%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	orang/ bulan	42	orang/ bulan	42	orang/ bulan	100%	41	orang/ bulan	125	orang/ bulan	60%

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	3	laporan	60%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	5	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	3	laporan	60%
	Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepengawasan	100	20	persen	20	persen	20	persen	100%	20	persen	60	persen	60%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	475	0	paket	0	paket	0	paket	0%	245	paket	245	paket	52%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210	42	orang	42	orang	42	orang	100%	42	orang	126	orang	60%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	20	persen	20	persen	20	persen	100%	20	persen	60	persen	60%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	3	paket	60%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	9	paket	9	paket	9	paket	100%	9	paket	27	paket	60%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	paket	2	paket	2	paket	100%	2	paket	6	paket	60%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5	-	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	1	dokumen	1	dokumen	20%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1050	210	laporan	210	laporan	210	laporan	100%	210	laporan	630	laporan	60%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan	100	20	persen	20	persen	20	persen	100%	20	persen	60	persen	60%
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	20	unit	20	unit	20	unit	100%	31	unit	71	unit	47%

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100	persen	20	persen	20	persen	20	persen	100%	20	persen	60	persen	60%
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	3	laporan	60%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	180	laporan	36	laporan	36	laporan	36	laporan	100%	36	laporan	108	laporan	60%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	265	laporan	53	laporan	53	laporan	53	laporan	100%	53	laporan	159	laporan	60%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	100	persen	20	persen	20	persen	20	persen	100%	20	persen	60	persen	60%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165	unit	33	unit	33	unit	33	unit	100%	33	unit	99	unit	60%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	unit	25	unit	25	unit	25	unit	100%	25	unit	75	unit	60%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah saran dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	3	unit	60%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli daerah														
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0		0		0		0		0	0		0		0,00
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0	dokumen	0%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	persen	20	persen	20	persen	20	persen	100%	20	persen	60	persen	60%

	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	persen	20	persen	20	persen	20	persen	100%	20	persen	60	persen	60%
Analisa dan Pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Analisa dan Pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	30	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100%	6	dokumen	18	dokumen	60%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4	laporan	12	laporan	60%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	653	unit	3	unit	3	unit	3	unit	100%	500	unit	506	unit	77%
Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100%	3	laporan	9	laporan	60%
Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBDP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBDP2) dan Perkotaan (PBBDP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOPnya	186.000	Objek Pajak	37.200	Objek Pajak	37.200	Objek Pajak	37.200	Objek Pajak	100%	8.800	Objek Pajak	83.200	Objek Pajak	45%
Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	55	Layanan	11	Layanan	11	Layanan	11	Layanan	100%	11	Layanan	33	Layanan	60%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	6	dokumen	60%
Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	9	dokumen	180%
Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	60%
Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3	laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	0%	1	laporan	1	laporan	33%

2.2 Analisis Kinerja Badan Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra, disajikan pada tabel, 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kategori Kapasitas Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)	-	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,6%	3,23%	3,29%	3,29%	3,53%	3,96%	23,08%	5,93%	3,29%	3,29%	Persentase
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	81	82	83	75,12	87	80	81	Satuan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Untuk menetapkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memetakan interaksi antara faktor lingkungan internal dengan lingkungan eksternal melalui proses memadukan faktor-faktor internal dengan faktor-faktor eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan penentuan isu-isu strategis tersebut, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sebagai satuan kerja di bidang pengelolaan pendapatan daerah, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala pelayanan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan PAD, berikut ini adalah permasalahan yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal :

1. Kuantitas SDM yang belum memadai dan masih di bawah kebutuhan riil pelaksanaan beban kerja;
2. Belum ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM);
3. Kebijakan mutasi (penempatan) pegawai kurang memperhatikan kuantitas dan kualitas (kompetensi) aparatur;

4. Belum optimalnya pembinaan secara administrasi dan teknis bagi petugas pemungut pajak, bendaharawan OPD dan PPK-OPD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
5. Subyek/Obyek Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali secara optimal;
6. Masih banyaknya potensi Wajib Pajak (WP) yang belum terdaftar, serta rendahnya wajib pajak (WP) yang sudah terdaftar;
7. Penyaluran Dana Bagi Hasil Perimbangan Keuangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah Kota Bontang, tidak tepat waktu;
8. Adanya Regulasi-regulasi yang berpengaruh pada penerimaan daerah

2.3.2. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, dapat diketahui dengan melakukan analisis dengan metode **SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)**.

Lingkungan Internal

- **Kekuatan (Strength)**

- Adanya Produk Hukum berupa Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Bontang. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem

administrasi dalam pengelolaan PAD maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah;

- Letak geografis Kota Bontang yang cukup strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang merupakan salah satu daerah yang memiliki objek wisata dan sebagai daerah industri berbasis kondensat yang memiliki banyak perusahaan multinasional. Hal ini dapat memberikan efek terhadap peningkatan Pendapatan Daerah;
 - Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang sesuai dengan analisis jabatan, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat selaku wajib pajak
 - Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
 - Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representative dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.
- **Kelemahan (*Weakness*) :**
 - Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan pajak daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik

berupa perda, perwali maupun keputusan walikota sehingga dapat dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

- Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan masih belum bisa diterapkan sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku;
- Masih terdapat potensi pendapatan yang cukup besar, namun belum optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah, seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, auditor, juru sita, dengan kondisi jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan.

Lingkungan Eksternal

• Peluang (*Opportunity*):

- Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya beberapa Pajak Pusat dan Pajak Provinsi diantaranya BPHTB, PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Air Tanah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kota Bontang;

- Kondisi sosial di Kota Bontang cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kota Bontang. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kota Bontang akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
- Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
- Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan provinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.
- **Ancaman (*Threat*):**
 - Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah;
 - Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak;
 - Kondisi Pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat mengakibatkan penurunan pembayaran Pajak Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2023 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG																			
RANCANGAN AWAL										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Lokasi		Keluaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Lokasi		Keluaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
5	5	UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN														UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN			
5	2	19.403.334.083														19.403.334.083			
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
5	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen			10.000.000			
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			8.000.000			
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen			5.000.000			
5	2	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
5	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	6.462.113.148	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang			6.462.113.148			
5	2	1	02:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan			25.000.000			

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023

5	2	1	02:02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.000.000
5	2	1	02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
5	2	1	05:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	500.000.000
5	2	1	02:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	10 Orang	230.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	10 Orang	230.000.000
5	2	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
5	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	40.070.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	40.070.000
5	2	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kaontor yang disediakan	10 Paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kaontor yang disediakan	10 Paket	250.000.000
5	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 Paket	31.224.642	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 Paket	31.224.642
5	2	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	15 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	15 Paket	50.000.000

5	2	1	02:06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	10.000.000
5	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	597.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	597.000.000
5	2	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	2	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	250.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	250.000.000
5	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	2	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 Laporan	8.000.000
5	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	283.445.971	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	283.445.971
5	2	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	2.212.529.455	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	2.212.529.455

5	2	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 unit	229.122.685	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 unit	229.122.685
5	2	1	02:09	2	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18 unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18 unit	140.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 JENIS	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 JENIS	50.000.000
5	2	1	02:09	10	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Sarana dan prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	365.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Sarana dan prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	365.000.000
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
5	2	4	02:01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						
5	2	4	02:01	2	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	150.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	150.000.000
5	2	4	02:01	3	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	170.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	170.000.000

5	2	4	02:01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100 unit	4.496.286.540	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100 unit	4.496.286.540
5	2	4	02:01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data	11 Laporan	200.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data	11 Laporan	200.000.000
5	2	4	02:01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	46000 objek pajak	1.700.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	46000 objek pajak	1.700.000.000
5	2	4	02:01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	74.758.032	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	74.758.032
5	2	4	02:01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	11 Dokumen	411.503.241	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	11 Dokumen	411.503.241
5	2	4	02:01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	40 Dokumen	32.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	40 Dokumen	32.000.000

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023

5	2	4	02:01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	207.280.369	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	207.280.369
5	2	4	02:01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	200.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	200.000.000
TOTAL										19.403.334.083	TOTAL			19.403.334.083

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kota Bontang serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, penelaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang adalah Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/volume	catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	
2	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian, kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang memuat 7 (tujuh) Program Nasional meliputi : (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.; (2) Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing ; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim; (7) Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk medesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Bapenda Kota Bontang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan memberikan jaminan ketersediaan anggaran melalui realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja BAPENDA mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kota Bontang Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2023 adalah Meningkatnya Kemandirian Fiskal di Daerah. Dengan indikator tujuannya, yaitu "Kategori Kapasitas Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)".

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2023 adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program dan kegiatan yang dirancang Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
			4	5	6		8	9
1 Program Penuhjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Persentase Pemenuhan Layanan Penuhjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kota Bontang	100 persen	11.761.505.901,00	Dana Umum (APBD)	7	100 persen	16.275.338.497,00
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Bontang	4 Dokumen	23.000.000,00	Dana Umum (APBD)		4 Dokumen	28.797.500,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	2 dokumen	10.000.000	Dana Umum (APBD)		2 dokumen	11.797.500,00
Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	1 Dokumen	8.000.000	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	10.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	1 dokumen	5.000.000	Dana Umum (APBD)		1 dokumen	7.000.000,00
Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Administrasi Dokumen	Kota Bontang	15 Dokumen	6.492.113.148,00	Dana Umum (APBD)		14 Dokumen	11.124.297.856,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	41 Orang	6.462.113.148	Dana Umum (APBD)		41 Orang	11.089.297.856,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kota Bontang	1 Laporan	25.000.000	Dana Umum (APBD)		1 Laporan	30.000.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Bontang	2 Laporan	5.000.000	Dana Umum (APBD)		2 Laporan	5.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Bontang	100	730.000.000,00	Dana Umum (APBD)		100	350.000.000,00

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023

Pengadaan Pakaiannya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	2 Paket	500.000.000			1 Paket	100.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	Kota Bontang	10 Orang	230.000.000	Dana Umum (APBD)		15 Orang	250.000.000,00
Administrasi umum perangkat daerah	Percentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Bontang	100 persen	978.294.642,00	Dana Umum (APBD)		12	1.060.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Bontang	4 Paket	40.070.000	Dana Umum (APBD)		5 Paket	50.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kaontor yang disediakan	Kota Bontang	10 Paket	250.000.000	Dana Umum (APBD)		10 Paket	250.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Bontang	10 Paket	31.224.642	Dana Umum (APBD)		12 Paket	50.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bontang	15 Paket	50.000.000	Dana Umum (APBD)		15 Paket	50.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Bontang	12 Dokumen	10.000.000	Dana Umum (APBD)		12 Dokumen	10.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	56 Laporan	597.000.000	Dana Umum (APBD)		70 Laporan	650.000.000,00
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Percentase Pengadaan	Kota Bontang	100 persen	250.000.000,00	Dana Umum (APBD)		5 Paket	150.000.000,00
Pengadaan Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Bontang	5 Paket	250.000.000	Dana Umum (APBD)		3 Paket	150.000.000,00
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Bontang	100 persen	2.503.975.426,00	Dana Umum (APBD)		12	2.953.120.456,00
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kota Bontang	1 Laporan	8.000.000	Dana Umum (APBD)		1 Laporan	8.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bontang	12 Laporan	283.445.971	Dana Umum (APBD)		12 Laporan	350.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Bontang	12 Laporan	2.212.529.455	Dana Umum (APBD)		12 Laporan	2.595.120.456,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Percentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	Kota Bontang	100 persen	784.122.685,00	Dana Umum (APBD)		12	609.122.685,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bontang	15 unit	229.122.685	Dana Umum (APBD)		15 unit	279.122.685,00

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pejaknya	Kota Bontang	18 unit	140.000.000	Dana Umum (APBD)	16 unit	130.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Bontang	5 JENIS	50.000.000	Dana Umum (APBD)	5 JENIS	50.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang	2 Unit	365.000.000	Dana Umum (APBD)	2 Unit	150.000.000,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Kota Bontang	100 persen	7.641.828.182,00	Dana Umum (APBD)	14,91 persen	6.645.196.934,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bontang	100 persen	7.641.828.182,00	Dana Umum (APBD)	12	6.645.196.934,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang	1 dokumen	150.000.000	Dana Umum (APBD)	1 dokumen	250.000.000,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang	12 Laporan	170.000.000	Dana Umum (APBD)	12 Laporan	350.913.414,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang	100 unit	4.496.286.540	Dana Umum (APBD)	50 unit	3.095.499.910,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data	Kota Bontang	11 Laporan	200.000.000	Dana Umum (APBD)	11 Laporan	200.000.000,00
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NIOF nya	Kota Bontang	46000 objek pajak	1.700.000.000	Dana Umum (APBD)	46000 objek pajak	1.700.000.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang	11 Layanan	74.758.032	Dana Umum (APBD)	11 Layanan	250.000.000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Kota Bontang	11 Dokumen	411.503.241	Dana Umum (APBD)	11 Dokumen	411.503.241
Pengajian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pengajian Pajak Daerah	Kota Bontang	40 Dokumen	32.000.000	Dana Umum (APBD)	40 Dokumen	150.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang	11 Dokumen	207.280.369	Dana Umum (APBD)	11 Dokumen	207.280.369
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Tamsaksi Pemerintah Daerah	Kota Bontang	1 Laporan	200.000.000		1 Laporan	30.000.000
Total				19.403.334.083,00	22.920.535.431,00		

BAB IV

PENUTUP

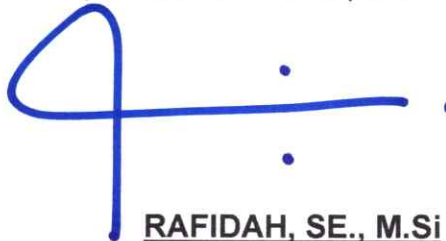
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 merupakan wujud dan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja merupakan bagian tahapan dalam pelaksanaan suatu perencanaan dimana tujuan akhir yang diharapkan adalah adanya pedoman dan acuan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah . Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian semoga dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah ini dapat menjadi acuan demi tercapainya tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Bontang, Agustus 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah



RAFIDAH, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700323 200112 2 003